

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK 2022



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK SEKRETARIAT DPRD

Jl. Sultan Trenggono No. 45 DemakKode Pos 59572 Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab@gmail.com

Demak, Juli 2022

Nomor : 050/ Kepada:

Lampiran: 1 (satu) berkas Yth. Kepala Bappelitbangda

Perihal : Permohonan Verifikasi Kabupaten Demak

Rancangan Akhir Renja di –

<u>Tahun 2023</u> <u>Tempat</u>

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, dengan hormat kami sampaikan permohonan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2023.

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN DEMAK

MUH. MUCHLIS, SE, M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19680721 198903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 65 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kabupaten Demak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkanperencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Demak diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2023. Perumusan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2023 mengakomodir program-program yang ada di PD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk tahun 2023 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak memuat

rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2023.

Sebagai salah satu PD di Kabupaten Demak, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak ikut serta dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yaitu "Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera". Serta bila dikaitkan dengan Misi Pembangunan Kabupaten Demak 2021-2026, maka upaya yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak adalah Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.

Nilai Budaya Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak **"PINTAR"**, yang merupakan akronim dari:

- 1. **Profesional,** nilai yang diwujudkan dalam perilaku kerja yang selalu berpatokan pada prosedur operasional baku yang digunakan sebagai acuan merencanalkan dan melaksanakan pekerjaan serta senantiasa mengembangkan skill, knowledge, dan attitude .
- 2. **Integritas,** nilai yang diwujudkan dalam bentuk konsisitensi antara tindakan dengan norma, system nilai, kewajiban kepatutan;
- 3. **Akuntabel,** nilai yang terwujud melalui kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban bagi setiap individu maupun organisasi.
- 4. **Responsif**, nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan tantangan yang ada, serta memfasilitasi secara prima;

Adapun Motto layanan Sekretariat DPRD Kab. Demak adalah "Berpikir Cerdas, Bertindak Tangkas, Bekerja Tuntas".

Mengacu pada pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Demak tahun 2023 tidak lepas dari beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Apa yang sudah di capai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah di tetapkan. Artinya, apa yang sudah di capai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki.
- 2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah-masalah yang di hadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- 3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional:
- 13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang di mutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- 33. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
- 34. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor xx Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- 35. Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Demak.
- 36. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- 1. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Demak untuk Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Demak yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 serta Program Unggulan Bupati Demak.
- Sebagai dokumen penjabaran Renstra PD dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023.
- 3. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2023 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2023 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja Perangkat Daerah

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Menguraikan tentang kondisi pelayanan Sekretariat DPRD

Kabupaten Demak. Bab ini juga menguraikan evaluasi
pelaksanaan Renja 2021.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Memuat tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2023 beserta
kerangka pendanaannya.

BAB V Penutup.

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sampai dengan tahun 2021, Sekretariat DPRD telah melaksanakan semua program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya. Adapun seluruh capaian kinerja program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang mana dari program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan, secara umum capaian kinerja dari 8 kegiatan dan 24 kegiatan tersebut dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terdiri dari 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan dan secara umum capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - a. Kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, ditujukan untuk pembahasan rancanga perda dan Fasilitasi penyusunan penjelaan/keterangan naskah akademik, anggaran dapat terealisasi 82,37%.
 - b. Kegiatan peingkatan kapasitas pimpinan DPRD, ditujukan untuk bimbingan teknis DPRD, publikasi dan dokumentasi dewan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, dapat terealisasi 80,51%.

- c. Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat ditujukan untuk kunjungan kerja dalam daerah dan pelaksanaan reses terealisasi 88,38%.
- d. Kegiatan Fasilitasi tugas DPRD, ditujukan untuk koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD terealisasi 87,82%.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kab. Demak Lembar:

				Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kineria Program	Target Kinerja Akhir Renstra	Realisasi Kinerja	Target dar	n Realisasi Kinerja Rer	nja Tahun 2021		aian Target Akhir 2016-2021
	K	ode		Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	(Outcome)/Kegiatan (output)	2016-2021 (Tahun 2021)	Sampai Dengan Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian (%) Tahun 2021	Realisasi s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian s/d Tahun 2021 (%)
		1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
				SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK								
				PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN					-			
1	20	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran	960	468	-	-		468	48,75%
			101	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlayaninya administrasi perkantoran	60	36		-		36	60,00%
20	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi,Air dan Listrik	Tercapainya kelancaran komunikasi telepon, air dan listrik	60	36		-		36	60,00%
20	1	7		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pelaksana kegiatan	60	36		-		36	60,00%
				Penyediaan jasa kebersihan Kantor (Cleaning Service)	Kebersihan Kantor seluas 2.539 m2	60	36				36	60,00%
20	1	10		Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	60	36		-		36	60,00%
20	1	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terseduanya barang cetakan dan penggandaan	60	36		-		36	60,00%
20	1	12		Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	36		-		36	60,00%
20	1	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	60	36		-		36	60,00%

20	1	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undang	60	36	-	36	60,00%
				penyediaan bahan logistik kantor		60	36		36	60,00%
20	1	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	60	36	-	36	60,00%
20	1	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara vertikal dan horisontal	60	36	-	36	60,00%
20	1	19		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya pegawai non PNS	60	36	-	36	60,00%
20	1	20		penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		60	36		36	60,00%
20	1	21		Perawatan/Pengobatan Kesehatan		60	50		50	83,33%
				Fasilitasi Kehumasan, publikasi dan Protokol		60				0,00%
20	2	11	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana/prasarana aparatur (bulan) yang terpenuhi	1.367	1.046	-		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasaional	Tersedianya kendaraan dinas	2	-	-	-	0,00%
				Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas	Kelancaran tugas dan pekerjaan	-	12	-	12	
				Pengadaan perlengkapann gedung /kantor	Kelancaran dan perlengkapan pelayanan pekerjaan	60	36	-	36	60,00%
				Pengadaan peralatan gedung /kantor	Kelancaran tugas dan pekerjaan	60	48	-	48	80,00%
				Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Pengadan bahan / material rumah Jabatan (bln)	60	48	-	48	80,00%
				Pemeliharaan rutin / berkala gedung / kantor	Pengadaan bahan / material pemeliharaan gedung kantor seluas 5000 m2	60	48	-	48	80,00%

Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Pengadaan suku cadang dan bahan untuk perawatan mobil dinas pimpinan 5 buah.	15	21	_	21	140,00%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil Anggota DPRD / Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Pengadaan suku cadang dan bahan untuk perawatan mobil dinas / operasional 27 buah & roda 2(dua) 43 buah.	60	48	-	48	80,00%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan	Pengadaan suku cadang dan jasa untuk perawatan rumah jabatan/dinas	60	36	-	36	60,00%
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung / kantor	Pengadaan suku cadang dan jasa untuk perawatan peralatan gedung kantor.(bln)	60	48	-	48	80,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlayaninya administrasi perkantoran	60	48	-	48	80,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi,Air dan Listrik	Tercapainya kelancaran komunikasi telepon, air dan listrik	60	48	-	48	80,00%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pelaksana kegiatan	60	48	-	48	80,00%
Penyediaan jasa kebersihan Kantor (Cleaning Service)	Kebersihan Kantor seluas 2.539 m2	60	48	-	48	80,00%
Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	60	36	-	36	60,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terseduanya barang cetakan dan penggandaan	60	36		36	60,00%
Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	36	-	36	60,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	60	48	-	48	80,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undang	60	48	-	48	80,00%
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	60	48	-	48	80,00%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara vertikal dan horisontal	60	48		48	80,00%
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya pegawai non PNS	60	48	-	48	80,00%
penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		36	37	-	37	102,78%
Perawatan/Pengobatan Kesehatan	Perawatan/Pengobatan Kesehatan	150	100	-	100	66,67%
Fasilitasi Kehumasan, publikasi dan Protokol	Fasilitasi Kehumasan, Publikasi dan Protokol	24	24	-	24	100,00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
Pengadaan pakaian dinas .	Pengadaan PSH 100 buah, PDH 50 buah, PSR 50 buah.(bln)	12	12	-	12	100,00%
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						
Bimbingan tehnis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pemahaman tugas dan fungsi meningkat, peningkatan kinerja aparatur	10	6	-	6	60,00%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan PSH 100 buah, PDH 50 buah, PSR 50 buah.(bln)	400		-		0,00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan.						
Penyusunan pelaporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya RKA, DPA, dan SPJ 202 bendel (bln)/ Tersusunnya RKA, DPA, LAKIP, RENJA, LKPJ TAPKER	12	12	-	12	100,00%
Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.		137	109	-	109	79,56%
Pembahasan rancangan peraturan daerah	Disetujui / ditetapkannya peraturan daerah	12	3	-	3	25,00%

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.	Terlaksananya diklat peningkatan tugas dan fungsi Anggota Dewan (kl)	12	9	_	9	75,00%
Fasilitasi Pengkajian Peraturan Perundang- undangan dan Penyusunan Produk Hukum		-	6	-	6	0,00%
Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD		-	12	-	12	0,00%
Hearing/dialog dengan Pemda dan tokoh masyarakat / tokoh agama	Dihasilkannya keputusan DPRD yang sesuai produk hukum yang berlaku (keg)	12	50	-	50	416,67%
Rapar-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terbahasnya raperda-raperda yang diajukan. (rpt)	12	3	-	3	25,00%
Rapat - rapat Paripurna.	Pembahasan dan penetapan raperda	12	3	-	3	25,00%
Kegiatan Reses.	Terserapnya masukan dan aspirasi konstituen & masyarakat. (reses)	12	3	-	3	25,00%
Kunjungan kerja Pimpinan & Anggota DPRD dalam daerah	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kab. Demak	12	3	-	3	25,00%
Kunjungan Kerja / Studi Banding keluar Daerah.	Bertambahnya Wawasan / Pengetahuan Anggota DPRD (kl)	12	3	-	3	25,00%
Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	Tersusunya 10 (sepuluh) raperda inisiatif dan Naskah Akademik	12	3	-	3	25,00%
Penyediaan jasa Publikasi, Dokumentasi dan Keprotokolan	Tersebarnya informasi kegiatan DPRD	12	3	-	3	25,00%
Penyusunan buku memori DPRD masa bhakti 2009- 2014 / Penyusunan buku memori risalah DPRD Kab Demak	Terbukunya kegiatan DPRD masa bhakti 2009 - 2013	1	1	_	1	100,00%
Pelaksanaan pemilihan dan penetapan wakil Bupati		1	1	-	1	100,00%

Pelaksanaan Pelantikan/Sumpah Janji Wakil Bupati		1	1				1	100,00%
Pelantikan / pengambilan sumpah / janji anggota DPRD masa bhakti 2019 - 2024	Terlantiknya 50 anggota DPRD Kab. Demak masa bhakti 2014 - 2019	1	1		-		1	100,00%
Penetapan dan pelantikan Pimpinan DPRD masa bhakti 2014-2019	Terlantiknya 4 Pimpinan DPRD Kab. Demak masa bhakti 2014 - 2019	1	1		-		1	100,00%
Penyusunan Risalah Rapat - rapat	Tersusunnya risalah rapat	12	3		-		3	25,00%
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		12	12		-		12	
Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah		12	12		-		12	100,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Dukungan Teknis Program Keuangan Umum dan Kepegawaian			100%				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0		35	117	334,29%	117	0,00%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium bagi Non PNS kantor dan rumah dinas yang dibayarkan	0		45	142	315,56%	142	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Aparatur							
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah PNS yang menerima pakaian			50	53	106,00%	53	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kinerja Aparatur			2	1	50,00%	1	0,00%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi umum Perangkat Daerah		100				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Perlengkapan Listrik dan Elektronik yang tersedia		12	12	100,00%	12	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga dan Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia		120	120	100,00%	120	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman		60	56	93,33%	56	0,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetak dan penggandaan		6000	5650	94,17%	5650	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan di DPRD Kab. Demak		6000	5025	83,75%	5025	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		25	24	96,00%	24	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100	43	43,00%	43	0,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas		2	-	-		0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor		20	20	100,00%	20	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		20	20	100,00%	20	0,00%
Pengadaan gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya gedung Kantor atau bangunan lainnya		3	3	100,00%	3	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusanpemerintahan daerah						

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim		1000	1203	120,30%	1203	0,00%
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Langganan Listrik, Air, Internet dan Telepon		3	12	400,00%	12	0,00%
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan dan keamanan gedung dan rumah dinas yang disediakan		3	12	400,00%	12	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah		100	69			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelancaran Mobilitas Pimpinan DPRD		24	24	100,00%	24	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelancaran Mobilitas Sekretariat DPRD		24	21	87,50%	21	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keamanan dan kenyamanan gedung/kantor		3	12	400,00%	12	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitas arana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan rumah dinas Pimpinan DPRD		3	12	400,00%	12	0,00%
'Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							
Pelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD		50	200	400,00%	200	0,00%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Anggota Dewan yang menerima pakaian dinas		5	4	80,00%	4	0,00%
Layanan Administrasi DPRD			100	31	31,00%		0,00%

Fasilitasi rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat yang dilakukan		12	19	158,33%	19	0,00%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tercukupinya kebutuhan rumah tangga pimpinan		12	12	100,00%	12	0,00%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda		25				
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			100%				
Pembahasan rancangan Perda	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan		16	12	75,00%	12	0,00%
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/keterangan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademis yang disusun		6	7	116,67%	7	0,00%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas						
Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas		8	6	75,00%	6	0,00%
Publikasi dan dokumentasi Dewan	Jumlah informasi DPRD yang di informasikan melalui media massa		90	82	91,11%	82	0,00%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Notulensi Hearing		20	15	75,00%	15	0,00%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersdianya dokumen hasil reses		150				
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Laporan Kunjungan Kerja yang disusun		46	18	39,13%	18	0,00%
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Reses DPRD		150	150	100,00%	150	0,00%

		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Risalah Rapat yang disusun						
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Laporan Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ studi banding yang disusun		48	40	83,33%	40	0,00%
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Risalah Rapat yang disusun		40	48	120,00%	48	0,00%
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan		40	32	80,00%	32	0,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi diharapkan dapat meningkatkan SDM melalui berbagai pelatihan dan BIMTEK, Program Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Mendukung kegiatan DPRD dilakukan melalui pelaksanaan rapat koordinasi internal yang dilaksanakan mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun dalam rangka evaluasi capaian kinerja.

Sampai dengan akhir tahun 2021 kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak diantaranya alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat bengkel dan alat ukur, alat-alat studio dan komunikasi, bangunan gedung, instalasi, dan jaringan telah direalisasikan. Tugas Pokok Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi serta mendukung Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran dan fungsi DPRD yang lebih peka terhadap keinginan masyarakat, lebih aspiratif, informatif dan meningkatnya peran fungsi dewan dalam pengawasan, pembentukan peraturan daerah dan penganggaran melalui program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2021 mengelola anggaran APBD sebesar Rp64,157,684,762.00 Penjabaran anggaran tersebut diantaranya mendukung kinerja DPRD melalui 3 fungsi DPRD yaitu Pengawasan, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penganggaran.

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak melakukan fasilitasi terhadap kinerja DPRD melalui 2 program kerja yang melekat pada Sekretariat DPRD dengan anggaran APBD Murni, yaitu: (a). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 42.797.949.762,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.280.529.774,00 atau 96,45%. (b). Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 21.359.735.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.117.054.241,00 atau 84,82%. Dari total anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 64.157.684.762,00 terserap Rp. 59.397.584.015,00 atau sebesar 92,58% sehingga ada anggaran yang tidak terserap sejumlah Rp. 4.760.100.747,00 atau sebesar 7,42%

Beberapa hal yang menyebabkan adanya sisa anggaran adalah:

- a. Dengan adanya pandemi covid-19 menyebabkan banyak kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal.
- b. Adanya sisa at cost perjalanan dinas
- c. Selisih harga antara SHBJ sebagai perencanaan dengan harga riil pelaksanaan.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak berdasarkan rumusan indikator kinerja utama. Kinerja penyelenggaraan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Demak dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Demak

					Та	rget Renstra P	erangkat Dae	rah	Realisas	si Capaian	Pro	yeksi	
NO	Indikator	IKU	SPM	IKK	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Catatan Analisis
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	٧	-	-	-	-	81,50	81,75	-	-	81,60	81,80	
	Presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V	-	-	-	-	100	100	-	-	100	100	
3	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	٧	-	-	-	-	76,50	76,60	76,58	-	76,70	76,90	
	Presentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang Mencapai Target	V	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	V	-	-	83	84	84,10	84,20	84	86	84,30	84,50	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan hal itu, sebuah konsep diperkenalkan yaitu konsep (Good Governance) tata kepemerintahan yang baik. Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani dan pihak swasta.

Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosialpolitik dan kinerja dari lembaga pemerintahan untuk kemaslahatan
rakyat banyak, bukan hanya kemakmuran orang per orang atau
kelompok tertentu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Demak sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah
Kabupaten Demak, pada tahun 2023 mendatang merupakan tahun
keempat masa jabatan keanggotaan periode 2020-2024, sehingga
Sekretariat DPRD harus dapat menyusun rencana program dan
kegiatan yang mendukung kinerja DPRD yang bersinergi dengan visi
dan misi Bupati terpilih.

Sekretariat DPRD harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum daerah pada 2023 tahun anggaran guna menunjang program-program pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. Adapun isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak pada tahun 2023 adalah:

- 1. Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas fungsi DPRD dalam mendukung pencapaian 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kabupaten Demak RKPD 2023 meliputi:
 - (1) Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama;
 - (2) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *smart city*;
 - (3) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah;
 - (4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - (5) Pengembangan inovasi daerah;

- (6) Perluasan kawasan perkotaan;
- (7) Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama dikawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi;
- (8) Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat;
- (9) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.
- 2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, akan mewarnai pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan, sehingga alokasi waktu pembahasan bahan acara tidak dapat diseragamkan.
- 3. Perubahan kebijakan pusat yang begitu cepat yang berdampak pada aturan-aturan dan mekanisme yang sifatnya teknis yang perlu disiapkan oleh daerah dan membutuhkan waktu untuk penyelarasannya, terutama kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah yang harus melibatkan DPRD.
- 4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada masyarakat penyebarluasan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan hasil kerja dewan melalui berbagai macam media komunikasi kepada masyarakat tetap menjadi bagian dari fasilitasi kedewanan.
- 5. Beberapa tahun ke belakang, pemerintah menerapkan sistem Zero Growth dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) dan kedepan bergeser menuju Negative Growth tentu akan berdampak kepada penurunan jumlah PNS dan PNSD di semua PD, sehingga jumlah PNS Sekretariat DPRD Kab. Demak yang berkurang karena pensiun akan mengakibatkan kurang maksimalnya fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan. Disisi yang lain terkait dengan Sumber Daya Manusia secara kualitas masih kurang sehingga diperlukan peningkatan kapasitas baik melalui pendidikan formal maupun dengan diklat-diklat teknis fungsional yang mendukung fasilitasi kepada dewan.
- 6. Sekretariat DPRD mempunyai peran strategis sebagai unsur PD (eksekutif) dan penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD yang secara tidak langsung diperlukan untuk menjaga harmonisasi dan kelancaran hubungan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif.
- 7. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah.

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi dan misi Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 sebagai berikut: "Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik,serta kehidupan bermasyarakat yang agamis,kondusif dan berbudaya;
- 2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing;
- 3. Mendorong pertumbuhan ekomomi berbasis potensi local, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah:

- 1. Meningkatkan Pelayanan Publik Sekretariat DPRD;
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;
- 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada DPRD.

Upaya dalam mencapai tujuan ini adalah:

- 1. Meningkatkan Kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD
- 2. Meningkatkan layanan dan fasilitasi pendukung pelaksanaan fungsi DPRD di bidang Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Anggaran dan Pengawasan.

Sasaran yang akan dicapai:

- 1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif;
- 2. Meningkatnya capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD;
- 3. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada DPRD.

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya:

- 1. Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk aparatur Sekretariat DPRD.
- 2. Meningkatkan layanan dan fasilitasi dibidang pendalaman tugas anggota DPRD.
- 3. Meningkatkan layanan dan fasilitasi dibidang sarana dan prasarana.
- 4. Meningkatkan layanan dan fasilitasi di bidang administrasi keuangan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu:

a. Kelembagaan dan Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam melaksanakan fungsi fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD belum optimal, sehingga diperlukan penyelarasan Rencana Kerja DPRD dengan Rencana Kerja Sekretariat DPRD, sehingga seluruh ketugasan anggota DPRD terjabarkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

b. Sumber Daya Manusia

Keter batasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, baik dari sisi kualitas dan kuantitas.

- c. Pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.
- d. Regulasi

Dinamika peraturan-peraturan baru sehingga harus harus dilakukan penyesuaian.

e. Sarana dan Prasarana

Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana kerja pada tiaptiap bagian sesuai kebutuhan.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, terdapat faktor-faktor yang teridentifikasi tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- 1. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- 2. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugastugas kedewanan secara berkesinambungan.
- 3. Perubahan regulasi, kebijakan pemerintah, dan produk perundang-undangan yang cukup cepat menyebabkan anggota DPRD harus memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai terhadap dinamika tersebut.
- 4. Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat.
- 5. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.
- 6. Profesionalisme serta kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021-2026 akan mengupayakan terwujudnya tujuantujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

b. Peluang

Sedangkan pada sisi peluang, peluang bagi Sekretariat DPRD untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya terdapat faktor-faktor yang melingkupi diantaranya:

- Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD.
- 2. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Dewan.
- 3. Kebijakan Reformasi Birokrasi menjadi daya dorong guna mewujudkan perubahan pada mental apartur, organsiasi, tata laksana, sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan
- 4. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD.
- 5. Terbukanya peluang pengembangan teknologi informasi dan pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4.1Membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan analisa Kebutuhan Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Pada perencanaan awal rencana pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam 2 program dan 14 kegiatan dengan total Rp75,517,104,911 tetapi pada perkembangan selanjutnya menjadi Rp.63,398,921,508 . Perubahan terjadi pada program :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari Rp44,326,518,379 menjadi Rp44,086,061,823

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dari Rp31,190,586,532 menjadi Rp19,312,859,685

Secara lengkap dan rinci, review terhadap rancangan awal RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Demak disajikan pada Tabel 2.3 dibawah.

Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

		Ran	cangan Awal RKPD				Hasil Ana	lisis Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan/Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	Catatan
	Kegiatan			Capaian	(Rp)	Kegiatan			Capaian	(Rp)	Penting)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SEKRETARIAT DPRD				75,517,104,911					67,082,528,288	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Demak	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 persen	44,326,518,379	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Demak	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti		44,330,480,362	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				47,100,000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,900,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	5,600,000	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	5,600,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,122,769,797	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,454,529,840	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	348 OB	3,598,868,997	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3,930,629,040
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium ASN dan non ASN pendukung pelaksanaan tugas yang terbayar	336 OB	523,900,800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	523,900,800
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			220,830,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			220,830,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan	55 unit	18,200,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	18,200,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	55 orang	202,630,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	202,630,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkpan kantor yang di sediakan	100 persen	696,144,472	Administrasi Umum Perangkat Daerah			658,984,472
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 unit	29,504,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29,504,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	80 jenis	187,232,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	187,232,700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	10 unit	129,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	69,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8000 lembar	20,115,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20,115,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	1380 eksemplar	97,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	75,000,000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40,000,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan	60 kali	220,192,772	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	220,192,772
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang tertata	2000 arsip	12,900,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	12,900,000
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	5,040,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,038,196,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			277,144,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaran dinas jabatan yang diadakan	1 unit	516,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 unit	64,500,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	22,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	7 unit	130,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	130,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	11 unit	327,696,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	125,144,000
Penyediaan Jasa Penunjang			1,424,531,060	Penyediaan Jasa Penunjang			1,476,950,000
Urusan Pemerintahan Daerah		1000	00.000.000	Urusan Pemerintahan Daerah		101	05.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000 surat	28,200,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25,200,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang terpenuhi	4 layanan	773,431,060	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	828,850,000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 layanan	622,900,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	622,900,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,011,963,602	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			951,963,602
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang terpelihara	1 unit	99,310,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	99,310,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	24 unit	339,128,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	339,128,000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	50 unit	15,000,000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	15,000,000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	81,620,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	6 unit	416,804,462	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	315,710,762
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung/bangunan yang direhabilitasi	6 jenis	141,721,140	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	41,194,840
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	60,000,000

	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			34,672,613,448	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			35,092,613,148
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	600 OB	34,102,613,448	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	34,522,613,148
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian PSR, PSH, PDH dan baju adat utk pimpinan dan anggota DPRD yang disediakan	200 stel	495,000,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	495,000,000
					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	75,000,000
	Layanan Administrasi DPRD			1,139,470,000	Layanan Administrasi DPRD			1,146,970,000
					Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	7,500,000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	266 kali	670,800,000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan	670,800,000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah pimpinan DPRD yang disediakan belanja kebutuhan rumah tangganya	1 orang	468,670,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	468,670,000
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 persen	31,190,586,532	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			22,752,047,926
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			7,104,239,000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5,640,611,000
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Propemperda yang Dibahas	1 dokumen	155,422,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	154,300,000

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah raperda yang dibahas	15 dokumen	5,795,000,000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	4,432,494,000
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan kajian Perundang- undangan	1 kegiatan	450,817,000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undanga	1 Dokumen	450,817,000
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang disusun	6 dokumen	703,000,000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	603,000,000
Pembahasan Kebijakan Anggaran			6,729,087,000	Pembahasan Kebijakan Anggaran			3,956,494,000
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1,179,000,000	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	677,679,000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen pembahasan perubahan KUPA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	1,179,000,000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	677,679,000
Pembahasan APBD	Jumlah dokumen pembahasan APBD	1 dokumen	1,179,000,000	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	428,898,000
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen pembahasan perubahan APBD	1 dokumen	1,569,087,000	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	677,679,000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1,623,000,000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1,494,559,000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			3,655,688,000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			2,045,898,394
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah dokumen pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	1 dokumen	250,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	185,068,348
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	1 dokumen	250,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	185,068,348

	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Jumlah dokumen	1 dokumen	250,000,000	Pengawasan Urusan	Jumlah Laporan	1 Laporan	185,068,348	
	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang			Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang			
		Kesejahteraan Rakyat			1000janioraan Haityat	Kesejahteraan Rakyat			
	Pengawasan Urusan Pemerintahan	jumlah dokumen	1 dokumen	250,000,000	Pengawasan Urusan	Jumlah Laporan Hasil	1 Laporan	185,068,348	
	Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan			Pemerintahan Bidang	Pengawasan Urusan			
		Pemerintahan bidang			Perekonomian	Pemerintahan Bidang			
		Perekonomian				Perekonomian			
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah dokumen	1 dokumen	818,890,000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	300,296,000	
	Pemeriksaan Laporan Keuangan	tindak lanjut hasil			Pemeriksaan Laporan Keuangan	Pengawasan Tindak			
	oleh Badan Pemeriksa Keuangan	pemeriksaan keuangan oleh BPK			oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh			
		Redailgail oleil BFR				Badan Pemeriksa			
						Keuangan			
	Pembahasan Laporan Keterangan	Jumlah dokumen	1 dokumen	1,836,798,000	Pembahasan Laporan Keterangan	Jumlah Rekomendasi	1 Dokumen	1,005,329,000	
	Pertanggungjawaban Kepala	Rekomendasi/		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Pertanggungjawaban Kepala	Hasil Pembahasan		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Daerah	Catatan Strategis			Daerah	Laporan Keterangan			
		terhadap LKPJ				Pertanggungjawaban			
						Kepala Daerah			
	Peningkatan Kapasitas DPRD			6,040,477,532	Peningkatan Kapasitas DPRD			5,446,310,532	
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah anggota	300 orang	4,150,000,000	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil	6 Dokumen	3,345,268,000	
		DPRD yang mengikuti				Pendalaman Tugas			
		Pendalaman Tugas DPRD				DPRD			
-	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jumlah publikasi yg	3 jenis	856.105.332	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	1,056,105,332	
	Fublikasi dali Dokumentasi Dewan	dilaksanakan di media	3 jenis	030, 103,332	Publikasi dali Dokumentasi Dewam	Penyebarluasan Produk	12 Dokumen	1,030,103,332	
		didicarianari di modia				Hukum Daerah, Publikasi			
						dan Dokumentasi Dewan			
	Penyediaan Kelompok Pakar dan	Jumlah pakar/tim ahli	7 orang	204,000,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan	Jumlah Orang dalam	6 Orang	204,000,000	
	Tim Ahli	yang tersedia			Tim Ahli	Kelompok Pakar dan Tim			
						Ahli			
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli	7 orang	210,000,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	210,000,000	
		fraksi yang tersedia	41				100		
	Penyelenggaraan Hubungan	Jumlah	1 kegiatan	322,953,200	Penyelenggaraan Hubungan	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	322,953,200	
	Masyarakat	terselenggaraanya silaturahmi	16000		Masyarakat	Penyelenggaraan			
		kebangsaan,	ekemplar 15 kegiatan			Hubungan Masyarakat			
		tersedianya majalah	15 kegialan						
		varia legislatif							
		terselenggaranya							
		hearing							
	ı l						1	1	

Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD yang disusun	1 dokumen	297,419,000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	307,984,000	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			3,593,061,000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			3,088,751,000	
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yg dilaksanakan	60 kegiatan	755,000,000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	60 Laporan	492,190,000	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	801,166,000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	301,166,000	
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	2,536,895,000	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	2,295,395,000	
Fasilitasi Tugas DPRD			4,068,034,000	Fasilitasi Tugas DPRD			2,573,983,000	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8 Dokumen	2,550,032,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8 Dokumen	1,435,564,000	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD yang disusun	1 Dokumen	349,386,000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	15 Laporan	349,386,000	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yg dilakukan oleh Pimpinan DPRD	48 kali	1,168,616,000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48 Dokumen	789,033,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2023 di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, terdapat usulan dari pemangku kepentingan /pokir pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD di sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan berupa usulan belanja jasa advetorial media senilai Rp200.000.000,00 dengan besaran nilai Rp2.000.000,00 pada setiap peliputannya, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Demak
Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kab. Demak

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Adventorial Media		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100 Liputan	DITERIMA

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak terlepas atau tidak dibawah wewenang dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Jendral DPR RI. Walaupun mempunyai tugas dan fungsi yang sama, tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Demak. Sehingga kebijakan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak terlepas dari kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Jendral DPRD RI, dimana kebijakan yang diambil dapat digunakan sebagai wacana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten/kota lainnya.

Tahun 2023 disebut juga sebagai "tahun penyelamat" (safe guarding) bagi penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2020-2024. Tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu dan pilkada serentak, sehingga capaian-capaian pembangunan diharapkan dapat selesai pada tahun 2023.

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yaitu:

- a. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,
- b. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan,
- c. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job,
- d. Mendorong pemulihan dunia usaha,
- e. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
- f. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim,
- g. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan
- h. Pengembangan Ibu Kota Nusantara.

Provinsi Jawa Tengah pada rancangan RKPD 2023 menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 yaitu "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang

Semakin Sejahtera dan Berdikari", dengan fokus untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tetap positif antara lain:

- a. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- b. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
- c. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Tema RKPD Kabupaten Demak tahun 2023 adalah Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerataan Pembangunan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi". Berdasarkan penyelarasan dengan kebijakan perekonomian nasional dan provinsi, secara umum arah kebijakan perekonomian dan pembangunan Demak tahun 2023 adalah:

- a. Akselerasi reformasi birokrasi di setiap urusan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan pelayanan publik secara terpadu dalam rangka peningkatan daya tarik investasi daerah;
- b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, khususnya penanganan Covid-19 dan *stunting*, dan pelayanan dasar lainnya sesuai standar pelayanan minimal;
- c. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui peningkatan investasi daerah, pengembangan UMKM, kolaborasi pariwisata dan kebudayaan, serta ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi;
- d. Perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan;
- e. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial

terutama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan penanganan dampak sosial akibat Covid-19.

Di dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak harus mengacu kepada visi dan misi Bupati Demak. Visi dan misi Bupati Demak diterjemahkan secara nyata dan aplikatif di dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Demak, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak harus menjadi *supporting system* yang profesional dan modern. Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di semua bagian.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Demak diberikan alokasi pagu sebesar Rp67,082,528,288.00 (enam puluh tujuh milyar delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pada tahun 2023, usulan anggaran pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak adalah sebesar Rp75,517,104,911.00 (tujuh puluh lima milyar lima ratus tujuh belas juta seratus empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah) tersebut maka pendekatan efektivitas yang disusun pada tahun 2023 dengan usulan dan ketepatan harus dapat dilaksanakan dengan baik. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran tersaji pada lampiran Tabel Rencana Kerja Tahun 2023. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 telah sesuai dengan kebutuhan.

Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika baik itu perekonomian makro daerah maupun keadaan lainnya yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan penyesuaian terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Demak saat ini, arah kebijakan tersebut menemukan tantangan sekaligus peluangnya. Tantangan yang dihadapi di tahun mendatang yaitu:

a. wilayah pesisir Kabupaten Demak yang berada di jalur pantura sering mengalami rob menyebabkan turunnya minat investor

- untuk membangun tempat produksinya di Kabupaten Demak;
- b. tingkat kemiskinan Kabupaten Demak masih tinggi dan termasuk lokus penanganan kemiskinan ekstrem;
- c. dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat yang sangat cepat yang harus segera direspon oleh Pemerintah Daerah;

Meskipun demikian, Kabupaten Demak juga memiliki peluangpeluang yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi perekonomian, di antaranya:

- a. selesainya pembangunan jalan tol Semarang-Demak dan dimulainya pembangunan tol Demak-Tuban;
- b. Kabupaten Demak masuk dalam jalur revitalisasi kereta api;
- c. masuknya Demak dalam kawasan Urban Mobility Plan;
- d. sudah meredanya pandemi Covid-19 sehingga aktivitas perekonomian masyarakat sudah menggeliat, termasuk meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata ke Kabupaten Demak;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu dan mendukung Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Sekretariat DPRD Kabupaten Demak mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan serta sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi (a). peyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; (b). penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; (c). fasilitasi penyelenggaraan rapat; (d). penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; (e). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Renja ini disusun dengan maksud untuk menjadi rujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, agar setiap pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak memahami dengan benar beban tugasnya masing-masing sehingga dapat menjalankan fungsi organisasi secara keseluruhan, yang bertujuan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2023 adalah :

- Meningkatkan pelayanan publik Sekretariat DPRD dan sasaran terwujudnya pelayanan publik yang responsif dengan indikator indeks kepuasan masyarakat, pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Demak mencatat target sebesar 81,75 dan prosentase keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti sebesar 100%.
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD dan sasaran meningkatnya capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD, pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Demak mencatat indikator tujuan atau sasaran target nilai SAKIP Sekretariat DPRD 76,60 dan presentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target sebesar 100% serta indeks kepuasan anggota DPRD atas pelayanan Sekretariat DPRD sebesxar 84,20.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang diemban.

4.1 Program dan Kegiatan

4.1.1 Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja dan pendanaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak mencakup program-program prioritas maupun non prioritas yang merupakan program pendukung kegiatan DPRD Kabupaten Demak. Indikasi rencana program prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Demak berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka pendek maupun untuk pemenuhan layanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam periode Tahun Anggaran 2023, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan semuanya hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Demak, tidak ada yang bersumber dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Demak.

Program dan Kegiatan Dalam penyusunan Renja 2023 ini terbagi dalam 2 (dua) program dengan 16 (enam belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan, yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi kegiatan
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.
 - 1.3 Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - b. Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi.
 - 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Penyediaan peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan;
 - f. Fasilitasi kunjungan tamu;
 - g. Penyelenggaraaan rapat koordinaasi dan konsultasi SKPD;
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 - 1.6 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Pengadaan mebel;
 - b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;

- c. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 1.7 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- 1.8 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan;
 - c. Pemeliharaan Mebel;
 - d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedungg kantor dan bangunan lainnya;
 - f. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 1.9 Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, meliputi sub kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - b. Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
 - c. Pelaksanaan medical check up DPRD.
- 1.10 Layanan administrasi DPRD, meliputi sub kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD;
 - b. Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
 - c. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD.
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, meliputi kegiatan :
 - 2.1 Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah;
 - b. Pembahasan rancangan perda;
 - c. Penyelenggaraan kajian peundang-undangan;

- d. Fasilitasi penyusunan /penjelasan/ keterangan dan / atau naskah akademik.
- 2.2 Pembahasan kebijakan anggaran, meliputi sub kegiatan :
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - c. Pembahasan APBD;
 - d. Pembahasan APBD perubahan;
 - e. Pembahasan pertanggungjawaban APBD.
- 2.3 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi, sub kegiatan:
 - a. Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum;
 - b. Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur;
 - c. Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
 - d. Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian;
 - e. Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. Pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban Kepala Daerah.
- 2.4 Peningkatan kapasitas DPRD, meliputi sub kegiatan:
 - a. Pendalam tugas DPRD;
 - b. Publikasi dan dokumentasi dewan;
 - c. Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi;
 - e. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - f. Penyusunan program kerja DPRD.
- 2.5 Penyerapan penghimpunan aspirasi masyarakat, meliputi sub kegiatan :
 - a. Kunjungan kerja dalam daerah;
 - b. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - c. Pelaksanaan reses.

- 2.6 Fasilitasi tugas DPRD, meliputi sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
 - b. Penyusunan laporan kinerja DPRD;
 - c. Fasilitasi tugas pimpinan DPRD.

Adapun tabel rencana kerja dan pendanaan pada program dan kegiatan prioritas dan subkegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kab. Demak

Ко	de				Urusan/ Bidang Urusan/		Indikator Kinerja				R	encana Tahun 20)23			Prakiraan Ma	ju Rencana Tahu	n 2024
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Cap	oaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4			UN	SUR					PENDU	KUNG URUSA	N PEMERINT	AHAN			<u> </u>			
4	2			SEKR	ETARIAT DPRD								67,082,528,288					63,425,402,404
4	2	1	PR	OGRA	M PENUNJANG URUSAN PEMER	RINTAHAN DAERAH KA	BUPATEN/KOTA						44,330,480,362					44,112,542,719
4	2	1	2.01	erenca	naan, Penganggaran, dan Evalua	si Kinerja Perangkat D	aerah						47,100,000					49,934,000
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penggaran dan laporan kinerja daerah	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 %	3 Dokumen	10 dokumen	5,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklarijuti	100 %	900,000
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen perencanaan, penggaran dan laporan kinerja daerah	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 %	2 Dokumen	10 dokumen	5,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	600,000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	jumlah dokumen perencanaan, penggaran dan laporan kinerja daerah	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 %	2 Dokumen	10 dokumen	5,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	600,000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan, penggaran dan laporan kinerja daerah	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 %	3 Laporan	10 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklarijuti	100 %	47,834,000

Kod	e				Urusan/ Bidang Urusan/		Indikator Kinerja				R	Rencana Tahun 20	123			Prakiraan Ma	ju Rencana Tahun 2	2024
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Ca	oaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangk	at Daerah							4,454,529,840					4,122,769,797
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	28 Orang/bul	a1ndokumen	3,930,629,040	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 persen	3,598,868,997
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan		100 persen	12 Dokumen	1 dokumen	523,900,800			Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 persen	523,900,800
4	2	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daera	h pada Perangkat Daei	 rah						3,395,300					3,395,300
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	JJumlah Laporan BMD Perangkat Daerah yang sudah di Rekonsiliasi	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3,395,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 %	3,395,300
4	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Pera	ngkat Daerah							220,830,000					220,830,000
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	2 Paket	100 Persen	18,200,000	Dana Transfer Umum-		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	18,200,000
4	02 0	01 2.	.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	55 Orang	100 Persen	202,630,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	202,630,000
4	02 0	01 2	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Daerah	1	l	1	1	1	I	658,984,472	1		1	I	678,984,472
4	02 0	01 2.	.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPersentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persenta	se2 Paket	100 persen	29,504,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPersentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persentase	29,504,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/		Indikator Kinerja				R	encana Tahun 20)23			Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun 2	2024
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Cap	oaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persenta	se2 Paket	100 persen	187,232,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPersentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persentase	187,232,700
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persenta	se2 Paket	100 persen	69,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPersentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persentase	129,000,000
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persenta	se2 Paket	100 persen	20,115,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPersentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persentase	20,115,000
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persenta	se12 Dokumen	100 persen	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPersentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persentase	35,000,000
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persenta	se12 Laporan	100 persen	40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPersentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persentase	40,000,000
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 persenta	se96 Laporan	100 persen	220,192,772	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPersentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persentase	220,192,772

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/		Indikator Kinerja				R	Rencana Tahun 2	023			Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun 2	2024
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Cap	oaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	OPersentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Dökumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persenta	se2 Dokumen	100 persen	12,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPersentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persentase	12,900,000
4 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	OPersentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persenta	se2 Dokumen	100 persen	5,040,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persentase	5,040,000
4 02 01 2.07 Pengad	aan Barang Milik Daerah Penun	l jang Urusan Pemerintal	n Daerah						277,144,000					481,216,440
4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah BMD yang diadakan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 %	1 Unit	18 unit	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 %	0
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah BMD yang diadakan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 %	3 Unit	18 unit	22,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 %	64,500,000
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah BMD yang diadakan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 %	3 Unit	18 unit	130,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 %	89,020,440
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah BMD yang diadakan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 %	11 Unit	18 unit	125,144,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 %	327,696,000
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ur	usan Pemerintahan Dae	rah			<u> </u>			1,476,950,000					1,374,531,060

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/		Indikator Kinerja				R	tencana Tahun 2	023			Prakiraan M	aju Rencana Tahur	1 2024
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Cap	aian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	12 Laporan	100 persen	25,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	28,200,000
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	3 Laporan	100 persen	828,850,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	773,431,060
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	4 Laporan	100 persen	622,900,000	Dana Transfer Umum-		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	572,900,000
4 02 01 2.09 Pemeli	haraan Barang Milik Daerah Per	nunjang Urusan Pemeri	ntahan Daerah						951,963,602					1,213,583,602
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah BMD yang Terpelihara		100 persen	1 Unit	109 unit	99,310,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	99,310,000
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD yang Terpelihara	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	21 Unit	109 unit	339,128,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	339,128,000
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah BMD yang Terpelihara	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	30 Unit	109 unit	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	15,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/		Indikator Kinerja				R	tencana Tahun 2	023			Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun	2024
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Cap	oaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD yang Terpelihara	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	53 Unit	109 unit	81,620,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	81,620,000
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD yang Terpelihara	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	7 Unit	109 unit	315,710,762	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	416,804,462
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD yang Terpelihara	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	50 Unit	109 unit	41,194,840	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	141,721,140
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD yang Terpelihara	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	19 Unit	109 unit	60,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	120,000,000
4 02 01 2.15 Layana	n Keuangan dan Kesejahteraan D	PRD							35,092,613,148					34,836,636,452
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah penerimaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang Disediakan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	50 Orang/Bul	a5n0 orang	34,522,613,148	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	34,037,500,452
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah penerimaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang Disediakan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	5 Paket	50 orang	495,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	724,136,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/							encana Tahun 2	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	ttan Lokasi Output Kegiatan	Target Cap	oaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah penerimaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang Disediakan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	50 Orang	50 orang	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	75,000,000
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD								1,146,970,000					1,130,661,596
4 02 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Dökumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen layanan Administrasi DPRD yang di sediakan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	1 Dokumen	7 dokumen	7,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	10,000,000
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Dokumen layanan Administrasi DPRD yang di sediakan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	4 Laporan	7 dokumen	670,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	651,991,596
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Dokumen layanan Administrasi DPRD yang di sediakan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	100 persen	4 Paket	7 dokumen	468,670,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 persen	468,670,000
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKS	 SANAAN TUGAS DAN FU	NGSI DPRD						22,752,047,926					19,312,859,685
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD												3,792,437,000
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang diselesaikan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Dokumen	23 dokumen	154,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	155,422,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub		Indikator Kinerja				R	encana Tahun 20	23			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
	Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Cap	oaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang diselesaikan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	15 Dokumen	23 dokumen	4,432,494,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	2,483,198,000	
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang diselesaikan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Dokumen	23 dokumen	450,817,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	450,817,000	
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang diselesaikan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	6 Dokumen	23 dokumen	603,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	703,000,000	
4 02 02 2.02	Pemba								3,956,494,000					4,030,417,500	
	asan Kebijakan Anggaran														
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan (KUA PPAS Perubahan, Murni, ABPD Perubahan dan APBD Murni)	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Dokumen	5 dokumen	677,679,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	611,496,500	
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan (KUA PPAS Perubahan, Murni, ABPD Perubahan dan APBD Murni)	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Dokumen	5 dokumen	677,679,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	611,496,500	
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan (KUA PPAS Perubahan, Murni, ABPD Perubahan dan APBD Murni)	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Dokumen	5 dokumen	428,898,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	626,841,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/		Indikator Kinerja				R	tencana Tahun 2		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Cap	oaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	manati (tp.)
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Pembahasan (KUA PPAS Perubahan, Murni, ABPD Perubahan dan APBD Murni)		77 %	1 Dokumen	5 dokumen	677,679,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	1,569,087,000
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan (KUA PPAS Perubahan, Murni, ABPD Perubahan dan APBD Murni)	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Dokumen	5 dokumen	1,494,559,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	611,496,500
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan P	Pemerintahan		<u> </u>	ı		I		2,045,898,394	l .		l		2,180,583,500
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Laporan	6 laporan	185,068,348	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	250,000,000
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Laporan	6 laporan	185,068,348	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	250,000,000
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Laporan	6 laporan	185,068,348	Dana Transfer Umum-		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	250,000,000
			Kesejahteraan Rakyat	Pemerintah						Dana Alokasi Umum				
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Demak, Wonosalam, Wonosalam	77 %	1 Laporan	6 laporan	185,068,350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	250,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja					R	tencana Tahun 20		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Cap	aian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Dokumen	6 laporan	300,296,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	611,496,500
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Dokumen	6 Iaporan	1,005,329,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	569,087,000
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			<u> </u>	<u> </u>	1			5,446,310,532	I .				4,013,584,700
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	6 Dokumen	31 Dokumen	3,345,268,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	2,418,568,000
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	12 Dokumen	31 Dokumen	1,056,105,332	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	669,773,500
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	6 Orang	31 Dokumen	204,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	204,000,000
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	7 Orang	31 Dokumen	210,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	210,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/				R	Rencana Tahun 20		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Ca	oaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	12 Dokumen	31 Dokumen	322,953,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	302,953,200
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Dokumen	31 Dokumen	307,984,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	208,290,000
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpuna	an Aspirasi Masyarakat		I	ı	1			3,088,751,000		l .		1	2,891,561,000
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	60 Laporan	151 dokume	n 492,190,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	755,000,000
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	1 Dokumen	151 dokume	n 301,166,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	301,166,000
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	150 Dokume	n151 dokume	n 2,295,395,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	1,835,395,000
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD								2,573,983,000					2,404,275,985
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	8 Dokumen	71 dokumen	1,435,564,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	1,256,856,985

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja					R	lencana Tahun 20)23			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program Keluaran Sub I	Keluaran Sub Kegiatan	egiatan Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	15 Laporan	71 dokumen	349,386,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	349,386,000
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	77 %	48 Dokumen	71 dokumen	789,033,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 %	798,033,000
	I		<u>I</u>		l	<u> </u>		TOTAL	67,082,528,288		I	<u>l</u>		63,425,402,404

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Demak Tahun 2023 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Demak Tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Demak Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka penengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- 1. Sekretariat, bidang-bidang, subbidang-subbidang, dan seluruh staf/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Demak secara bersamasama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan;
 - b. menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.
- 2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang dilaksanakan secara triwulan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Demak Tahun 2023 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja 2023 maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengkomunikasian/sosialisasi renja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari renja;
- c. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan renja yang telah dibuat.